BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dijadikan acuan sebagai kerangka berfikir yang berfungsi untuk mendalami masalah dari sebuah penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai informasi tambahan agar memudahkan pengerjaan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan dalam proses pengkajian kembali agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Menurut Yaoub dalam penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacoub, Hana Mutiaradina pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai pendapatan buruh tani yang ada dipedesaan masih sangat rendah, sehingga membuat tingkat kemiskinan di pedesaan masih sangat tinggi, sehingga perlu adanya aturan atau kebijakan yang mengatur mengenai pendapatan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh upah buruh tani pedesaan terhadap kemiskinan pedesaan. Persamaan dari penelitian adalah meneliti mengenai bagaimana kondisi kesejahteraan petani yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada fokusan penelitian.penelitian tersebut lebih fokus terhadap pengaruh upah buruh tani terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap bentuk nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peraturan daerah (Yacoub & Mutiaradina, 2020).

Kedua, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiwing Anggrianingsih pada tahun 2020 dalam Jurnal Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Pertanian Dalam Program

Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat" penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Dinas Pertanian dalam program kesejahteraan petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Upaya Dinas Pertanian dalam mensejahterakan petani yaitu dengan memberikan bantuan seperti benih, pupuk, dan pestisida. Selain itu, dinas pertanian juga memberikan obat-obatan untuk pengendalian hama. Selain memberikan bantuan langsung, Dinas Pertanian Kabupaten Bima juga menjadi fasilitator bagi para petani, disini tugas Dinas Pertanian Kabupaten Bima sebagai Fasilitator adalah menjelaskan dan memberi penyuluhan dibidang pertanian kepada para petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti harus terjun langusng ke lapangan untuk melakukan observasi, sehingga bisa mengamati langsung peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun perbedaan penelitian adalah belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Perbedaan selanjutnya adalah tempat penelitian yang berbeda, tempat penelitian tersebut berada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sedangkan peneliti memilih Kabupaten Pacitan Jawa Timur sebagai temoat penelitian (Anggrianingsih, 2020).

Ketiga, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rofiatul Maghfiroh, Nurul Umi Ati, Sunariyanto pada tahun 2021 dalam jurnal skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani". Dalam penelitian ini membahas tentang gambaran Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu mengenai menurunnya tingkat kesejahteraan petani yang diakibatkan oleh langkanya

pupuk subsidi yang terjadi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, meningkatkan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnins. Secara spesifikasi, tujuan dari penlitian ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik kualitatif. Dilakukan dengan melakukan observasi selama penelitian berlangusng dan setelah selesai penelitian di lapangan. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ada beberapa usaha yang dilakukan oleh dinas terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dari mulai mewujudkan peningkatan produksi pertanian, rencana strategis ketahanan pangan yang berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dll. Model kebijakan yang diambil oleh dinas terkait merupakan model Rasional Komprehensif dimana dalam merumuskan permasalahan dikembalikan kembali kepada pengambil keputusan untuk diri pribadi dalam masalah yang sedang menjadi perhatian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat atau meneliti mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah. Perbedaan penelitiannya adalah pada lokasi penelitian, lokasi penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Probolinggo. Perbedaan selanjutnya adalah pada fokusnya, penelitian tersebut terfokus pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sedangkan peneliti fokus terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan (Maghfiroh et al., 2021).

Keempat, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Medan Yonathan Mael pada tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti”. Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan melakukan pembanugnan pertanian yang

sesuai dengan potensi lokal yang diwujudkan dengan merumuskan program PKP (Padat Karya Pangan) yang merupakan inovasi daerah dalam mengelola beras miskin pemerintah pusat menjadi insentif bagi masyarakat yang mengenlola pertanian dengan pola usaha padat karya pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran menganai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Padat Karya Pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan pemilihan responden penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana cara pemerintah dalam menjalankan program-program yang sudah dibuat dengan tujuan kesejahteraan petani. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan pada penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Padat Karya Pangan. Sedangkan tujuan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan pemerintah terhadap kesejahteraan petani (Mael, 2017).

Kelima, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido, Ahsan Samad pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene". Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam mensejahterakan petani kakao melalui program pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal pemberdayaan masyarakat. Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Namun, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengakibatkan kurang maksimalnya bimbingan dan supervisi oleh UPTD Pertanian Kecamatan Malunda,

program pendidikan dan pelatihan masih belum bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat agar menjual olahan kakao agar memiliki nilai jual lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis penelitian tersebut adalah Deskriptif dan gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat *Stakeholder* yang terkait dari tingkat kepala dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti menganai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Perbedaan dari penelitiannya adalah pada objek penelitian, objek penelitian tersebut adalah petani kakao, sedangkan objek penelitian peneliti adalah petani padi (Badjido & Samad, 2014)

B. Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai suatu keputusan yang diambil untuk menangani suatu hal-hal tertentu. Dalam pengertiannya kebijakan (*Policy)* adalah sebagai suatu rangkaian panjang dari berbagai kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar keputusan (Hamdi, 2014). Dalam pengertian lain yang dikemukakan oleh Abdul Wahab bahwa kebijakan merupakan apapun cakupannya, sebetulnya merupakan berbagai tindakan yang memiliki pola dan mengarah kepada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan hanya sebuah keputusan acak untuk melakukan sesuatu (Nurfurqon, 2020). Sementara menurut Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangakaian tindakan yang

bertujuan untuk diikuti oleh individu maupun antar kelompok aktor yang berkenaan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang menarik perhatian (Hamdi, 2014). Setiap kebijakan harus memiliki kajian dan analisis yang kuat agar kebijakan nantinya tepat sasaran. Analisis kebijakan menurut Dunn (1981:35) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai cara atau metode pengkajian serta argumen untuk menghasilkan yang nantinya akan menghasilkan dan mentranformasikan informasi yang relevan untuk kebijakan yang bisa digunakan dalam *setting* politik untuk memecahkan masalah kebijakan. (Hamdi, 2014)

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi atau pengertian mengenai kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan.

2. Bentuk dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Publik dibuat atau disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan bisa sifatnya politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Jika dilihat dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai berupa barang maupun jasa kepada seluruh lapisan masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat banyak.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, kebijakan publik disusun dengan tujuan mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur jalannya ekonomi secara bebas yang kompetitif, memberi jaminan supaya aktivitas ekonomi tidak ada tekanan dari pihak mana pun, membuat lancar perputaran roda

ekonomi agar bisa bergerak secara bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan memberikan jaminan yang aman kepada kepentingan masyarakat yang tidak berdaya akibat kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik disusun dan dibuat untuk, mewujudkan pengendalian sosial terhadap masyarakat, mengatasi konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat, dan membangun relasi sosial antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi apapun.

Jika ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik digunakan untuk, menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh negara, dan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan aman di masyarakat (Affrian, 2012).

C. Konsep Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Konsep pemerintah daerah berasal dari terjemahan konsep *local goverment* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: Pemerintah lokal, Pemerintahan lokal, Wilayah lokal.

Pengertian Pemerintah lokal yaitu merujuk pada organisasi/lebaga/badan yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan Pemerintah daerah.

Pemerintahan lokal merupakan suatu kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pengaturan yang berfungsi untuk membuat kebijakan pemerintah daerah yang akan dijadikan arah atau dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Wilayah pemerintahan atau biasa disebut daerah otonom. Dalam konteks di negara Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri (Djaenuri, 2015).

Dari pengertian yang sudah diuraikan diatas, bisa disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan yang dijalankan oleh seorang kepala daerah yang memiliki wilayah pemerintahan atau disebut daerah otonom.

D. Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kebijakan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakatnya. Kesejahteraan adalah salah satu alat ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan pemerintah di suatu daerah atau wilayah. Banyak orang mengartikan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki harta dan pendapatan yang banyak. Padahal, konsep kesejahteraan tidak saja dilihat dari segi ekonomi, melainkan harus melihat kesejahteraan dari banyak aspek. Pengertian kesejahteraan sosial termuat dalam UU No. 11 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dalam pengertian lain Fahrudin mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial diartikan dimana seseorang mampu atau bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya serta mampu melaksanakan hubungan baik dengan lingkungan sekitar (Rohana, 2020).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjelaskan mengenai pengertian dari kesejahteraan sosial. Menurut PBB kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk membantu individu maupun masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan bisa meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Husna, 2014).

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep kesejahteraan sosial tidak bisa dilihat secara sempit. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan. Menurut Fahrudin dalam (Arabella, 2021) tujuan dari kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1) Untuk mencapai kehidupan sejahtera, dalam artian dapat memenuhi standar kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan linkungan sekitar.
2) Mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat sekitar. Seperti menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup sendiri.

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi dari kesejahteraan sosial adalah bertujuan untuk mengurangi beban perubahan sosial ekonomi, menghindari dampak sosial negatif dari pembangunan, dan

menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander & Apte (Haryanto & Fitri, 2019) fungsi kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Pencegahan

   Dukungan sosial bertujuan untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat untuk menghindari dari masalah sosial yang baru. Dalam transisi masyarakat, upaya pencegahan harus fokus kepada kegiatan yang dibuat untuk membantu menciptakan model baru hubungan sosial dan lembaga sosial.

2) Fungsi Penyembuhan

   Bantuan sosial diarahkan untuk menghilangkan kecacatan fisik, mental, dan sosial serta membantu orang yang menyandang masalah tersebut kembali berfungsi secara normal di lingkungan masyarakat.

3) Fungsi Pengembangan

   Dukungan sosial memiliki tujuan untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung pada proses perkembangan sosial atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial.

4) Fungsi Penunjang

   Fungsi penunjang mencakup kegiatan yang membantu mencapai tujuan sektor atau bidang lain dari pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sosial merupakan rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang akan menjadi sebuah alat ukur kesejahteraan suatu negara. Ukuran ini berfungsi sebagai alat untuk pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia karena yang menjadi menjadi tujuan penyelenggaraan negara yang dirumuskan sejak tahun 1945 yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengukur

kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif dikarenakan kesejahteraan menyangkut tentang perasaan seseorang (Setiawan et al).

Indikator kesejahteraan petani bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), menurut Ruauw mengatakan jika NTP > 100, maka petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar daripada konsumsi. Yang artinya pendapatan petani lebih besar daripada pengeluarannya. Dengan begitu tingkat kesejahteraan petani lebih baik. Selanjutnya jika NTP = 100, maka petani mengalami impas. Yang terakhir jika NTP < 100, artinya petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga konsumsinya sehinngga kesejahteraan petani mengalami penurunan (Keumala & Zainuddin, 2018).

E. Konsep Petani

1. Pengertian Petani

Petani di Indonesia lebih dekat dengan pengertian *peasant* seperti yang dijelaskan oleh Eric R. Wolf bahwa petani yaitu orang desa yang bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- dan menunaikan surplus sosial dan ritualnya (Abar, 2002). Dalam pengertian lain, petani yaitu penduduk yang secara langsung mencurahkan waktu dan pemikirannya untuk bercocok tanam serta mengambil keputusan dalam proses bercocok tanam. James Scott, Popkin, Ganjar kurnia, dan Burhan Arief mengemukakan bahwa pentani adalah insan ekonomi yang rasional dalam kapasitas budayanya, petani juga merupakan kelompok yang masuk dalam kelompok terpinggirkan (Sukayat et al., 2019). Dalam pengertian lain, petani adalah orang yang meiliki pekerjaan atau mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Dalam kesehariannya, petani biasanya hidup diantara dua dunia atau hidup dalam dua sisi. Disatu sisi, petani pada umumnya tinggal atau hidup di daerah-daerah

pedesaan yang terpisah dari perkotaan. Namun, disisi lain petani juga dipengaruhi oleh dunia luar yang dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi objek politik oleh para penguasa dan pihak luar (Iskandar, 2006).

Dari uraian diatas, peniliti bisa menarik kesimpulan bahwa petani merupakan salah satu pekerjaan atau kegiatan dengan mengolah lahan yang nantinya ditanami oleh tanaman pertanian seperti padi, jagung, tebu, dll.

2. Ciri-ciri Pertanian

Setiap pekerjaan memiliki ciri-ciri sendiri dalam melakukan kegiatannya, tak terkecuali petani dalam menjalankan aktifitas pertaniannya. Adapun ciri-ciri dari pertanian yang ada di Indonesia menurut Suhartono (2002: 21) yaitu:

1) Hak milik lahan pertanian para petani umuya sempit, yaitu kurang dari 0,5 Ha.
2) Pengolahan lahan di daerah yang padat penduduk dilakukan secara intensif sedangkan di daerah yang jarang penduduk dilakukan secara ekstensif
3) Merupakan pertanian sub sisten dengan modal yang kecil serta alat pendukung dan sistem pertanian yang terbilang masih sederhana.

3. Peran Petani

Dalam bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat. Dengan begitu, menurut Primada (2015) peran sumber daya manusia sebagai produsen dapat ditinjau dalam 3 aspek, yaitu:

1) Petani sebagai pekerja usaha tani

   Peran utama dari seorang petani dalam usaha tani adalah sebagai pekerja, yaitu petani sendiri yang mengusahakan usaha taninya. Dalam pelaksanaannya petani tidak bekerja seorang diri, petani juga dibantu oleh keluarganya. Anak petani yang berusia lebih dari 10 tahun sudah bisa menjadi sebagai tenaga kerja yang produktif.

Dia bisa membantu mengatur pengairan, menuai padi, mengangkut bibit, dan lain-lain.

2) Petani sebagai pemimpin usaha tani

Peran lain dari petani adalah sebagai pengelola usaha tani. Dalam peran ini, yang sangat diutamakan yaitu keterampilan, termasuk keterampilan dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Keputusan yang biasanya harus diambil oleh petani adalah seperti menentukan pilihan tenaman apa yang akan ditanam oleh petani, kapan mulai menanam, kapan tanaman harus diberi pupuk, dimana tempat membeli pupuk, dan lain-lain. Sejalan dengan keinginan pertanian yang maju. Petani harus meningkatkan kecakapannya pada proses jual-beli, misalnya menentukan bibit yang akan ditanam, menentukan pupuk yang berkualitas, atau membeli alat produksi untuk membantu usaha produksi pertanian.

3) Petani sebagai pribadi

Petani sebagai pribadi merupakan anggota keluarga dan petani merupakan anggota masyarakat. Sebagai manusia, peranan petani sama saja dengan peranan anggota masyarakat lainnya, karena pada dasarnya petani sama dengan semua manusia yang harus memiliki 4 kapasitas penting dalam haidupnya yaitu bekerja, belajar, berfikir kreatif, dan bercita-cita.

4. Macam-macam petani

Menurut Pertiwi (Firmansyah, 2014) secara umum petani bisa dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1) Petani pemilik lahan adalah petani yang memiliki lahan sendiri dan bertanggungjawab pada lahannya. Petani pemilik lahan memiliki hak penuh atas lahannya sendiri untuk memanfaatkan lahannya seperti menanam, memelihara, dan memanen hasil yang dilakukan sendiri.

2) Petani pemyewa merupakan petani yang menyewa lahan orang lain untuk melakukan kegiatan pertanian. Biasanya besar biaya sewa tergantung pemilik lahan yang menentukan biaya sewa.
3) Petani penggarap adalah petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Resiko yang dihadapi ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam berbagi hasil.
4) Buruh tani adalah petani yang bekerja di lahan orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya bergantung pada pemilik lahan sawah yang memperkerjakannya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG